



Kebijakan Ekonomi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dalam Perspektif Fiskal dan Moneter serta Relevansinya terhadap Sistem Ekonomi Indonesia

Muhammad Nayl Rizkika Aqyla¹, Ikhfina Maharani², Nurlaila Juniawati³, Zhaqiya Putri Adinda⁴, Lina Marlina⁵, Ana Fauziah Diyana⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi

E-mail: 241002111047@student.unsil.ac.id¹, 241002111072@student.unsil.ac.id²,
241002111071@student.unsil.ac.id³, 241002111070@student.unsil.ac.id⁴,
linamarlina@unsil.ac.id⁵, anafauziyadiyana@unsil.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received February 19, 2026

Revised February 22, 2026

Accepted February 26, 2026

Keywords:

Abu Ja'far Al-Mansur, Fiscal Policy, Monetary Policy, Islamic Economics, Indonesian Economic System

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic policies of Abu Ja'far al-Mansur from fiscal and monetary perspectives and examine their relevance to the Indonesian economic system. As the second caliph of the Abbasid Dynasty, al-Mansur is recognized for establishing a strong administrative and financial foundation for the state. Using a qualitative approach with a literature review method, this research examines historical and Islamic economic sources related to fiscal and monetary policies during his reign. The findings indicate that al-Mansur's fiscal policy was characterized by the centralization of the Baitul Mal, optimization of state revenues through taxation systems (kharaj and jizyah), and strict budgetary discipline. In the monetary sector, he emphasized the stability of the dinar and dirham, supervision of money circulation, and strengthening trade activities. The principles of fiscal prudence, efficient public spending, and monetary stability implemented by al-Mansur hold normative relevance to Indonesia's economic system, particularly in state budget management and monetary policy conducted by Bank Indonesia. This study concludes that despite differences in historical and governmental contexts, the financial governance values applied by al-Mansur remain conceptually relevant for strengthening national economic stability.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 19, 2026

Revised February 22, 2026

Accepted February 26, 2026

Kata Kunci:

Abu Ja'far Al-Mansur, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter, Ekonomi Islam, Sistem Ekonomi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan ekonomi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur dalam perspektif fiskal dan moneter serta mengkaji relevansinya terhadap sistem ekonomi Indonesia. Al-Mansur sebagai khalifah kedua Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai pemimpin yang berhasil meletakkan fondasi administrasi dan stabilitas keuangan negara. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur sejarah dan ekonomi Islam yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan moneter pada masa pemerintahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal al-Mansur ditandai dengan sentralisasi pengelolaan Baitul Mal, optimalisasi penerimaan negara



Indonesia

melalui sistem perpajakan (kharaj dan jizyah), serta penerapan disiplin anggaran yang ketat. Sementara itu, dalam bidang moneter, ia menekankan stabilitas nilai mata uang dinar dan dirham, pengawasan peredaran uang, serta penguatan aktivitas perdagangan. Prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi belanja negara, dan stabilitas moneter yang diterapkan al-Mansur memiliki relevansi normatif dengan sistem ekonomi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan APBN dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan konteks historis dan sistem pemerintahan, nilai-nilai tata kelola keuangan yang diterapkan al-Mansur tetap relevan sebagai rujukan konseptual dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

**Corresponding Author:**

Muhammad Nayl Rizkika Aqyla

Universitas Siliwangi

E-mail: 241002111047@student.unsil.ac.id**PENDAHULUAN**

Sejarah peradaban Islam mencatat bahwa stabilitas politik dan kemajuan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kualitas kebijakan fiskal dan moneter (Amalia 2010). Salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi Islam adalah Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua Dinasti Abbasiyah yang memerintah pada abad ke-8 M (Chamid 2010). Pada masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, sistematis, dan berorientasi pada penguatan fondasi administrasi negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik. Al-Mansur memimpin dalam situasi transisi politik pasca runtuhnya Dinasti Umayyah. Tantangan stabilitas negara, konsolidasi kekuasaan, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan mendorongnya untuk melakukan penataan ulang sistem fiskal dan moneter. Ia menerapkan sentralisasi pengelolaan Baitul Mal, memperkuat sistem perpajakan seperti kharaj dan jizyah, serta menerapkan disiplin anggaran yang ketat. Dalam bidang moneter, ia menjaga stabilitas nilai dinar dan dirham guna mendukung kelancaran perdagangan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mata uang negara (Amalia 2010). Kebijakan-kebijakan tersebut berkontribusi pada terciptanya stabilitas ekonomi yang menjadi fondasi kemajuan Dinasti Abbasiyah.

Di sisi lain, Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem ekonomi Pancasila menghadapi berbagai tantangan fiskal dan moneter, seperti pengelolaan defisit anggaran, stabilitas nilai tukar, serta pengendalian inflasi (Febriana 2024). Kebijakan fiskal dijalankan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui mekanisme APBN, sementara kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Dalam konteks tersebut, refleksi terhadap kebijakan ekonomi tokoh-tokoh sejarah Islam menjadi penting untuk menggali nilai-nilai konseptual yang dapat memperkaya wacana kebijakan publik kontemporer.



Meskipun terdapat perbedaan konteks historis, sistem pemerintahan, dan struktur ekonomi, prinsip-prinsip seperti disiplin fiskal, efisiensi belanja negara, stabilitas moneter, serta penguatan tata kelola keuangan tetap memiliki relevansi universal (Hafizhah et al. 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai kebijakan ekonomi Abu Ja'far al-Mansur dalam perspektif fiskal dan moneter serta relevansinya terhadap sistem ekonomi Indonesia menjadi penting untuk dilakukan, baik sebagai kontribusi akademik dalam pengembangan ekonomi Islam maupun sebagai refleksi normatif bagi penguatan kebijakan ekonomi nasional..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari literatur sejarah Islam, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kebijakan fiskal dan moneter Abu Ja'far al-Mansur serta sistem ekonomi Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan pendekatan komparatif untuk melihat relevansinya dalam konteks ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Fiskal Abu Ja'far al-Mansur

Abu Ja'far al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang memiliki orientasi kuat terhadap konsolidasi kekuasaan dan stabilitas keuangan negara. Dalam konteks fiskal, ia melakukan pembenahan sistem administrasi pajak yang sebelumnya belum sepenuhnya terorganisir pada masa transisi kekuasaan dari Dinasti Umayyah ke Abbasiyah (Rojana, Soliha, and Putri 2025). Reformasi tersebut mencakup penataan ulang sistem kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak bagi non-Muslim) agar lebih terukur, terdokumentasi, dan berada dalam pengawasan pemerintah pusat (Saprida, M.H.I, Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, Zuul Fitriani Umari 2021). Langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus meminimalkan kebocoran akibat praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat daerah.

Penguatan Baitul Mal menjadi kebijakan strategis lainnya. Pada masa al-Mansur, Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan kas negara, tetapi juga sebagai lembaga yang mengatur distribusi pendapatan dan pembiayaan pembangunan. Ia menerapkan sistem sentralisasi keuangan negara, sehingga alur pemasukan dan pengeluaran dapat dikendalikan secara langsung oleh otoritas pusat (Saprida, M.H.I, Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, Zuul Fitriani Umari 2021). Kebijakan ini memperkuat legitimasi pemerintah dan menciptakan stabilitas fiskal jangka panjang.

Dalam hal belanja negara, al-Mansur dikenal menerapkan prinsip kehati-hatian (*fiscal prudence*). Ia melakukan pengawasan ketat terhadap pengeluaran dan menghindari pemborosan anggaran. Akumulasi kas negara dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan menghadapi potensi krisis (Saprida, M.H.I, Dr. Qodariah Barkah, M.H.I, Zuul Fitriani Umari 2021). Namun demikian, kebijakan penghematan tersebut tetap diimbangi dengan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pembangunan kota Baghdad sebagai pusat administrasi, perdagangan, dan peradaban. Pembangunan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak menghambat investasi publik, melainkan diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi negara. Secara



keseluruhan, kebijakan fiskal al-Mansur menekankan optimalisasi pendapatan, pengendalian belanja, sentralisasi administrasi, serta penguatan struktur kelembagaan keuangan negara.

B. Kebijakan Moneter Abju Ja'far al-Mansur

Dalam bidang moneter, al-Mansur berfokus pada stabilitas dan kredibilitas mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi (Irawan 2025). Stabilitas nilai mata uang menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mendukung aktivitas perdagangan lintas wilayah. Pengawasan terhadap pencetakan dan peredaran uang dilakukan secara terstruktur untuk mencegah pemalsuan dan ketidakstabilan nilai.

Kebijakan moneter al-Mansur juga berorientasi pada penguatan perdagangan internasional (Rojana, Soliha, and Putri 2025). Stabilitas mata uang dan keamanan wilayah kekuasaan Abbasiyah mendorong berkembangnya jaringan perdagangan yang luas, baik di kawasan Timur Tengah, Asia, maupun Afrika Utara. Dengan demikian, stabilitas moneter tidak hanya berdampak pada transaksi domestik, tetapi juga meningkatkan posisi ekonomi Abbasiyah dalam perdagangan global pada masanya. Selain itu, pengawasan pasar dan distribusi barang turut dilakukan untuk menjaga kestabilan harga. Kontrol terhadap praktik penimbunan dan manipulasi pasar membantu mencegah lonjakan harga yang dapat merugikan Masyarakat (Dan and Abbasiyah 2020). Dalam konteks ini, kebijakan moneter al-Mansur tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan fiskal dan tata kelola pasar guna menjaga keseimbangan ekonomi makro. Fokus utamanya adalah menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan dan stabilitas ekonomi secara menyeluruh.

C. Gambaran Sistem Ekonomi Indonesia

Kebijakan fiskal di Indonesia dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai instrumen utama dalam mengatur aktivitas ekonomi nasional (Nurul Apriani, 2 Ranti Afrilianti Rusli, 3 Siti Nurhalizah, 4 Siti Ulpaija, 5 Tria Najiatal Rohmah, 6 Mia Lasmi Wardiyah, S.P. 2024). APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas makroekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah memiliki peran aktif dalam mengarahkan pembangunan nasional sesuai dengan tujuan konstitusional negara (Era, Marsudi, and Purbasari 2022).

Instrumen kebijakan fiskal mencakup penerimaan negara, belanja negara, serta pembiayaan anggaran. Penerimaan negara bersumber dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Belanja negara dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, serta perlindungan sosial. Sementara itu, pembiayaan defisit dilakukan melalui penerbitan surat utang negara atau instrumen keuangan lainnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan risiko fiskal jangka panjang.



Secara lebih rinci, kebijakan fiskal Indonesia meliputi beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Optimalisasi dan Diversifikasi Penerimaan Negara

Pemerintah berupaya meningkatkan basis pajak dan efektivitas pemungutan pajak guna memperkuat kapasitas fiskal negara. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang sekaligus menciptakan kemandirian pembiayaan pembangunan.

2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Negara

Belanja negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Prinsip value for money menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

3. Pengendalian Defisit dan Manajemen Utang Negara

Pemerintah menetapkan batas defisit anggaran guna menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan bayar serta keberlanjutan fiskal jangka panjang.

Sementara itu, kebijakan moneter berada di bawah kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen (Warjiyo, n.d.). Independensi Bank Indonesia merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas kebijakan moneter, terutama dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai rupiah (Umar S.E. 2017). Stabilitas moneter menjadi prasyarat utama bagi terciptanya iklim ekonomi yang kondusif, baik bagi kegiatan konsumsi, investasi, maupun perdagangan internasional.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan harga dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional (Ramdani et al. 2025). Inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi, sementara stabilitas sistem keuangan mencegah terjadinya krisis yang dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional (Hafizhah et al. 2024). Instrumen kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia antara lain:

1. Penetapan Suku Bunga Acuan

Suku bunga acuan berfungsi sebagai sinyal kebijakan untuk mempengaruhi tingkat suku bunga perbankan, konsumsi rumah tangga, dan investasi sektor riil.

2. Operasi Pasar Terbuka (OPT)

Melalui pembelian dan penjualan surat berharga, Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

3. Pengaturan Likuiditas dan Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem perbankan serta mencegah risiko sistemik yang dapat mengganggu perekonomian nasional.

Selain sistem konvensional, Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sektor ekonomi syariah. Pertumbuhan perbankan syariah, penerbitan sukuk negara, serta penguatan lembaga keuangan berbasis syariah mencerminkan meningkatnya peran ekonomi Islam dalam sistem ekonomi nasional (Irawan 2025). Instrumen-instrumen keuangan syariah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga membawa nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan



dalam pengelolaan ekonomi. Integrasi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan pengembangan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia bersifat adaptif dan inklusif. Nilai-nilai ekonomi Islam seperti keadilan distributif, larangan spekulasi berlebihan, serta penguatan sektor riil memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab tantangan ekonomi modern.

Dalam konteks ini, kajian terhadap kebijakan ekonomi historis pada masa Abu Ja'far al-Mansur menjadi relevan untuk dianalisis secara komparatif. Meskipun terdapat perbedaan konteks historis, struktur pemerintahan, dan sistem ekonomi, prinsip-prinsip yang diterapkan pada masa tersebut seperti disiplin fiskal, stabilitas moneter, sentralisasi pengelolaan keuangan, serta pengawasan pasar memiliki nilai universal yang dapat dijadikan refleksi normatif dalam penguatan kebijakan ekonomi nasional Indonesia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur ekonomi Islam, tetapi juga memperkaya perspektif dalam perumusan kebijakan publik kontemporer.

Pembahasan

A. Analisis Fiskal: Disiplin Anggaran al-Mansur dengan Defisit APBN Indonesia

Kebijakan fiskal pada masa Abu Ja'far al-Mansur menunjukkan karakter disiplin anggaran yang kuat dan berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Al-Mansur dikenal berhati-hati dalam mengelola pengeluaran negara serta berupaya memastikan bahwa pemasukan negara selalu berada dalam kondisi surplus atau setidaknya seimbang dengan pengeluaran. Akumulasi kas negara dipandang sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan dan menghadapi potensi krisis politik maupun ekonomi.

Pendekatan tersebut berbeda dengan kondisi fiskal Indonesia modern yang secara struktural sering mengalami defisit anggaran. Dalam praktiknya, APBN Indonesia dirancang dengan skema defisit yang dibiayai melalui utang negara atau instrumen pembiayaan lainnya. Kebijakan ini dijalankan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai bagian dari strategi ekspansi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan superioritas salah satu sistem. Konteks historis dan struktur ekonomi yang berbeda menjadi faktor utama. Pada masa al-Mansur, struktur ekonomi berbasis agraria dan perdagangan memungkinkan pengendalian penerimaan negara secara lebih langsung melalui pajak tanah (kharaj) dan jizyah. Sementara itu, Indonesia sebagai negara berkembang dengan sistem ekonomi global menghadapi dinamika yang lebih kompleks, termasuk fluktuasi harga komoditas, tekanan eksternal, serta kebutuhan belanja sosial dan pembangunan yang besar.

Namun demikian, terdapat nilai-nilai relevan yang dapat dikaji secara normatif. Pertama, prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Al-Mansur menerapkan pengawasan ketat terhadap pejabat keuangan guna mencegah penyimpangan. Dalam konteks Indonesia, transparansi menjadi aspek krusial dalam tata kelola APBN agar defisit yang terjadi tetap akuntabel dan tidak menimbulkan beban jangka panjang yang tidak terkendali. Kedua, prinsip efisiensi belanja negara. Disiplin anggaran al-Mansur menunjukkan bahwa pengeluaran negara harus diarahkan pada sektor-sektor produktif dan strategis. Dalam konteks Indonesia, efisiensi belanja menjadi penting agar defisit tidak



semata-mata membiayai pengeluaran konsumtif, melainkan investasi yang memiliki dampak multiplier terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, optimalisasi pajak tanpa membebani rakyat secara berlebihan. Reformasi perpajakan al-Mansur menekankan keteraturan administrasi dan keadilan dalam pemungutan.

Hal ini relevan dengan sistem perpajakan Indonesia yang terus berupaya memperluas basis pajak sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, meskipun pendekatan fiskalnya berbeda secara teknis, prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan keadilan tetap memiliki relevansi konseptual bagi kebijakan fiskal Indonesia.

B. Analisis Moneter: Stabilitas Dinar-Dirham dengan Rupia

Dalam bidang moneter, al-Mansur menempatkan stabilitas mata uang dinar dan dirham sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi. Stabilitas ini tidak hanya menyangkut nilai intrinsik logam mulia yang digunakan, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap otoritas pemerintahan. Pengawasan terhadap pencetakan dan peredaran uang dilakukan secara ketat untuk menjaga integritas sistem moneter. Sebaliknya, sistem moneter Indonesia modern berbasis mata uang fiat, yaitu rupiah, yang nilainya tidak ditopang oleh logam mulia melainkan oleh kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan negara. Otoritas moneter Indonesia berada di bawah kewenangan Bank Indonesia yang memiliki independensi dalam menetapkan kebijakan suku bunga, pengendalian inflasi, serta stabilisasi nilai tukar.

Perbedaan mendasar antara sistem dinar-dirham dan rupiah fiat terletak pada mekanisme penentuan nilai. Namun, esensi kebijakan moneter keduanya memiliki kesamaan tujuan, yakni menjaga stabilitas ekonomi makro. al-Mansur berupaya mencegah ketidakstabilan nilai tukar dan gangguan perdagangan melalui kontrol distribusi dan pengawasan pasar. Sementara itu, Bank Indonesia menggunakan instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan kebijakan makroprudensial untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai rupiah.

Nilai relevan yang dapat ditarik dari kebijakan al-Mansur adalah pentingnya independensi dan kredibilitas otoritas moneter. Meskipun pada masa Abbasiyah belum terdapat bank sentral modern, sentralisasi kebijakan moneter di bawah kontrol khalifah mencerminkan pentingnya otoritas tunggal yang kuat dalam menjaga stabilitas sistem. Dalam konteks Indonesia, independensi Bank Indonesia menjadi pilar utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali.

Selain itu, prinsip pengendalian inflasi menjadi titik temu yang signifikan. Stabilitas harga pada masa al-Mansur dijaga melalui pengawasan distribusi dan pencegahan praktik penimbunan. Dalam konteks modern, inflasi dikendalikan melalui kebijakan moneter dan koordinasi dengan pemerintah. Kedua sistem menunjukkan bahwa stabilitas harga merupakan prasyarat utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas nilai tukar juga menjadi aspek penting. Bagi Abbasiyah, stabilitas dinar-dirham memperkuat posisi perdagangan internasional. Bagi Indonesia, stabilitas rupiah menentukan daya saing ekspor, kestabilan impor, serta kepercayaan investor. Dengan demikian, meskipun instrumen dan sistemnya berbeda, orientasi kebijakan moneter tetap berfokus pada stabilitas dan kepercayaan publik.



C. Relevansi Kontekstual: Prinsip tidak termasuk kepada Replikasi

Kajian komparatif ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi al-Mansur tidak dapat diterapkan secara mentah dalam sistem ekonomi Indonesia modern. Perbedaan struktur ekonomi, sistem politik, teknologi keuangan, serta integrasi global menjadikan konteks keduanya sangat berbeda. Indonesia beroperasi dalam sistem ekonomi global yang kompleks, dengan interaksi pasar internasional, lembaga keuangan multilateral, dan dinamika geopolitik yang tidak ada pada abad ke-8.

Namun, relevansi kebijakan al-Mansur terletak pada prinsip-prinsip dasarnya. Pertama, disiplin fiskal sebagai fondasi stabilitas jangka panjang. Kebijakan defisit dalam APBN tetap harus dikelola dalam kerangka kehati-hatian agar tidak mengancam keberlanjutan fiskal. Kedua, tata kelola yang kuat dan terpusat secara sistemik. Sentralisasi administrasi pada masa al-Mansur mencerminkan pentingnya koordinasi dan kontrol dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks modern, hal ini tercermin dalam sistem audit, pengawasan internal, dan akuntabilitas publik. Ketiga, stabilitas moneter sebagai pilar kesejahteraan ekonomi. Baik dinar-dirham maupun rupiah, keduanya membutuhkan kepercayaan publik agar sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik. Keempat, integritas pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal dan moneter yang baik tidak hanya bergantung pada instrumen teknis, tetapi juga pada komitmen moral dan etika pemerintahan. Dalam perspektif ekonomi Islam, integritas menjadi bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan

Dengan demikian, studi terhadap kebijakan ekonomi al-Mansur memberikan kontribusi konseptual bagi penguatan sistem ekonomi Indonesia, khususnya dalam menanamkan nilai kehati-hatian, efisiensi, stabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola fiskal dan moneter. Relevansi tersebut bukan dalam bentuk adopsi literal, melainkan internalisasi prinsip-prinsip fundamental yang adaptif terhadap konteks kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kebijakan ekonomi Khalifah Abu Ja'far al-Mansur menunjukkan adanya fondasi fiskal dan moneter yang terstruktur, disiplin, serta berorientasi pada stabilitas jangka panjang. Dalam bidang fiskal, al-Mansur menekankan sentralisasi pengelolaan keuangan negara, optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem kharaj dan jizyah, serta pengawasan ketat terhadap pengeluaran negara. Prinsip kehati-hatian dalam belanja publik dan akumulasi kas negara menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam bidang moneter, stabilitas dinar dan dirham dijaga melalui pengawasan peredaran uang, penguatan perdagangan, serta pengendalian distribusi barang guna menjaga kestabilan harga. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa stabilitas mata uang dan kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi terciptanya keseimbangan ekonomi makro.

Apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi Indonesia, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks historis, struktur ekonomi, dan mekanisme kebijakan. Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran dengan kebijakan fiskal yang dikelola melalui APBN oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia serta kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Defisit anggaran dan sistem mata uang fiat merupakan karakteristik ekonomi modern yang berbeda dari sistem Abbasiyah. Namun demikian, relevansi kebijakan al-



Mansur terletak pada prinsip-prinsip dasarnya, yakni disiplin fiskal, efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan negara, stabilitas moneter, serta integritas tata kelola pemerintahan. Nilai-nilai tersebut tetap kontekstual dan dapat menjadi rujukan normatif dalam memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa kebijakan ekonomi al-Mansur tidak untuk direplikasi secara literal, melainkan untuk diinternalisasi prinsip-prinsip fundamentalnya dalam kerangka sistem ekonomi Indonesia yang modern dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2010. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer. Depok: Gramata Publishing.
- Chamid, Nur. 2010. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Dan, Umayyah, and Bani Abbasiyah. 2020. "At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman. Vol.9, No.2, 2020 | 66" 9 (2): 66–82.
- Era, Kenlies, Rosalina Marsudi, and Verbena Ayuningsih Purbasari. 2022. "IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA Implementation."
- Febriana, Moh Fitra. 2024. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam Serta Relevansinya Di Negara Indonesia Dahulu . Dalam Negara Islam , Kebijakan Fiskal Merupakan Salah Satu Perangkat Untuk Mencapai Yang Didasarkan Atas Distribusi Kekayaan Berimbang Dengan Menempatkan Nilai-Nilai Material" 3 (2).
- Hafizhah, Nur Zakiya, Program Studi, Magister Sains, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Airlangga, Lailatul Hikmah, et al. 2024. "Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024 PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL ISLAM TERHADAP KESENJANGAN DI INDONESIA" 7:1–10.
- Irawan, Harry. 2025. "KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM" 10 (204): 263–77.
- Nurul Apriani, 2 Ranti Afrilianti Rusli, 3 Siti Nurhalizah, 4 Siti Ulpaija, 5 Tria Najiatul Rohmah, 6 Mia Lasmi Wardiyah, S.P., M.Ag. 2024. "SISTEM EKONOMI INDONESIA 1" 2:596–613.
- Ramdani, Nuzul Fikri, Rozzy Apprirochman, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, and Universitas Teknologi. 2025. "Jurnal Bersama Ilmu Ekonomi Pengaruh Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Pembangunan" 1 (3): 188–95. <https://doi.org/10.55123/ekonom.v1i3.280>.
- Rojana, Shabaha El, Niadatus Soliha, and Anisa Putri. 2025. "Strategi Politik Ekonomi Islam Dalam Mengembangkan Perekonomian Pada Masa Daulah Abbasiyah Kepemimpinan Al-Mansur" 1 (2): 104–15.
- Saprida, M.H.I , Dr. Qodariah Barkah, M.H.I , Zuul Fitriani Umari, M.H.I. 2021. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: K E N C A N A.
- Umar S.E., M.SE. 2017. Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5.
- Warjiyo, Perry. n.d. Kebijakan Moneter Di Indonesia.